

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dampaknya masih terasa hingga tahun 2006 ini, baik secara makro pada tingkat nasional maupun pada kehidupan masyarakat, khususnya bagi rakyat kecil. Akibat dari krisis tersebut, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, sehingga angka pengangguran meningkat tajam. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok juga mengalami peningkatan yang signifikan sebagai akibat konsekuensi dari kenaikan harga produksi maupun distribusi barang-barang kebutuhan tersebut. Kondisi seperti ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin merosot tajam. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen mencatat, bahwa tahun 2005 di Kecamatan Kutowinangun terdapat 10.621 rumah tangga. Dari jumlah rumah tangga tersebut terdapat 3.943 yang termasuk dalam kategori miskin (37, 12%). Di Desa Ungaran sendiri terdapat 563 rumah tangga. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam kategori miskin sebanyak 220 rumah tangga (39, 08%). (BPS Kabupaten Kebumen dalam susenas 2005).

Kompleksnya permasalahan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga termasuk di Indonesia, selain disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi juga diakibatkan oleh suatu pola penanggulangan kemiskinan tersebut yang tidak memihak pada masyarakat yang menjadi sasaran utamanya pada kalangan masyarakat ekonomi rendah. Pola

penanggulangan kemiskinan selama ini menggunakan strategi 'dari atas kebawah' (*top down strategy*), dimana dengan cara seperti ini tidak memungkinkan bagi potensi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Pada awal prosesnya memang pola itu dapat membawa manfaat, tetapi tatkala pola itu mengacu menjadi sistem, timbullah masalah. Masyarakat terbiasa tergantung pada pemerintah, dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri sukar untuk dikembangkan.

Untuk mengatasi situasi seperti ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi kemiskinan atau membantu penduduk miskin, dalam beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana program ini meliputi beberapa program seperti program-program padat karya, Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Pengembangan Kecamatan (P2K), JPS bidang kesehatan, dan lain-lain. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui P2KP yang diselenggarakan pemerintah ini bukan semata-mata karena adanya krisis ekonomi. Melalui Inpres No.5 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia menyelenggarakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 1999 kerjasama kedua lembaga ini meluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Berbeda dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, P2KP ini melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat yang madani. Untuk itu P2KP menggunakan strategi yang meliputi (Pedoman Umum P2KP 1000:2).

1. Menerapkan konsep Tridaya (Daya Sosial, Daya Ekonomi, dan Daya Lingkungan).
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta pinjaman dan bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada kelompok.

Pada saat ini P2KP telah memasuki Tahap II (periode 2003-2008) yang mencakup sasaran 2.227 kelurahan/desa pada 79 kabupaten/kota propinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB dan sebagian Jawa bagian selatan.

Meskipun banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dari program-program tersebut. Menurut Mubyarto (1996:18), kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya:

Kelemahan pertama menyangkut orientasi program yang bersifat jangka pendek seperti pembagian sembako dan program padat karya. Program ini mungkin memang diperlukan terutama untuk meredam gejolak sosial, akan tetapi perlu dipertanyakan keberlangsungannya karena mempunyai implikasi yang negatif yang seharusnya dihindari apalagi jika proses distribusi bantuan kurang selektif dan transparan sehingga dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan yang justru akan memperburuk keadaan

Kelemahan kedua berkaitan dengan pemilihan kelompok sasaran yang seringkali kurang tepat. Dalam banyak kasus pemilihan kelompok sasaran dilakukan oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat miskin sehingga begitu saja diberikan kepada pihak yang seharusnya tidak membutuhkan.

Kelemahan ketiga sekaligus yang paling penting bahwa banyak program pengentasan kemiskinan dirumuskan tanpa menyertakan partisipasi atau peran aktif dari kelompok sasaran sejak awal pelaksanaan. Disamping itu pemerintah cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang paling tahu tentang kebutuhan dan cara menolong masyarakat miskin. Dalam kondisi seperti ini, program anti kemiskinan cenderung kurang partisipatif karena program dirumuskan ditingkat pusat tanpa melibatkan warga miskin yang akan dibantu.

Untuk meringankan beban masyarakat miskin pemerintah memberikan bantuan yang makin disempurnakan guna memperbaiki program-program yang sudah ada selama ini. Oleh karena itu pemerintah mengadakan upaya penanggulangan kemiskinan sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang disempurnakan dan ditingkatkan sejalan dengan arah baru pembangunan nasional melalui program pembangunan yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Adanya konsep pemberdayaan dan penguatan institusi lokal pada P2KP telah menjadikan perbedaan mendasar antara P2KP dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya, terutama dari segi visi dan misi yang diembannya. Sebagai mana kita ketahui, bahwa sejauh ini program/proyek penanggulangan kemiskinan yang sudah-sudah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh di tingkat masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hal ini terjadi antara lain karena aspek institusi

lokal kurang mendapat perhatian yang memadai dalam setiap kebijaksanaan (program/proyek) tersebut (Pedoman Umum P2KP, 1999:1). Melalui P2KP, program dijalankan tidak hanya bersifat reaktif dan bersifat sementara terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan berupa institusi lokal yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang (Pedoman Umum P2KP, 1999:1).

Konsep tersebut mengisyaratkan bahwa penanggulangan kemiskinan dikelola atas inisiatif masyarakat. Dalam istilah teknis P2KP, institusi lokal sebagai pengelola P2KP yang diupayakan semaksimal mungkin dibentuk secara demokratis ini dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), ialah institusi di tingkat lokal (kelurahan/desa sasaran) yang dilahirkan oleh P2KP.

BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Disamping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama (Pedoman Umum P2KP, 1999:36). Idealnya, BKM merupakan nama suatu lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan unsur masyarakat dalam keputusan yang kondusif untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Pendeknya, BKM dibentuk melalui proses yang demokratis, sebagai wakil masyarakat/relawan ditingkat kelurahan/desa yang dapat dipercaya sehingga memiliki nilai keswadayaan yang tinggi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan masyarakatnya khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Kedepan, BKM memiliki tugas dan misi menangani berbagai permasalahan kehidupan masyarakat secara

berkelanjutan khususnya menyangkut kemiskinan. BKM memiliki hak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya. Keberadaan BKM ditingkat kelurahan/desa merupakan prasyarat bagi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa. Oleh sebab itu, secara substansial BKM merupakan forum yang dibangun oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Penyediaan wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri dan masyarakatnya melalui BKM merupakan unsur yang sangat penting dalam P2KP sebagai program yang berorientasikan pada pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pembentukan kelembagaan BKM dalam hal ini amat erat kaitannya dengan upaya pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mensarikan pendapat bahwa pada pembentukan BKM sebagai badan pengelola P2KP di tingkat kelurahan/desa ini terletak gagasan yang cukup visioner yaitu dengan meletakkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan P2KP. Hal ini merupakan perkembangan baru dari program-program penanggulangan kemiskinan dimasa lalu dimana sifat program yang sangat *top down oriented* sekaligus meletakkan birokrasi sebagai unsur pelaksana yang sangat dominan, sehingga seringkali masyarakat hanya berperan sebagai penerima program. Perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian program sepenuhnya dilakukan oleh orang-orang dari luar komunitas masyarakat yang dilayani program. Sehingga keterlibatan anggota masyarakat dalam

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seringkali juga bersifat individual, tidak secara kolektif.

Gagasan pembentukan BKM ini merupakan perwujudan dari upaya pemberdayaan sekaligus pemampuan masyarakat dalam jangka panjang sebagai syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi segenap permasalahan sosial secara berkelanjutan. Konsentrasi pada pemberdayaan, pemampuan, dan penguatan (kelembagaan) masyarakat inilah yang menjadi ciri khusus dan strategis dari program P2KP.

Berkenaan dengan sangat pentingnya kedudukan BKM sebagai motor penggerak dan pengelola P2KP ditingkat kelurahan sasaran, maka keberhasilan BKM dalam menjalankan fungsinya tersebut akan sangat dipengaruhi oleh peran yang dijalankan oleh anggota-anggotanya. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan diri untuk mengkaji peran anggota BKM Al Amin dalam melaksanakan perguliran dana terhadap KSM. Keberhasilan BKM Al Amin dalam menjalankan tugasnya dapat terlihat dari bagaimana peran mereka dari mensosialisasikan program P2KP, pembentukan KSM, pembimbingan KSM hingga tahap pengawasan terhadap KSM. Dalam proses keluarnya dana dari P2KP, BKM Al-Amin termasuk dari beberapa BKM yang mampu mengusahakan pencairan dana dalam tempo relatif cepat. Dengan situasi yang demikian BKM Al Amin sudah bisa melakukan perguliran dana kepada KSM-KSM yang telah dibentuk. Karena perguliran dana terhadap KSM merupakan peran utama yang dilaksanakan BKM Al Amin dalam pelaksanaan P2KP. Melihat kondisi yang demikian menjadikan BKM Al Amin mempunyai peran positif mengingat mereka hanya sebagai relawan yang tidak menerima bayaran. Keberlanjutan perguliran dana tersebut memperlihatkan keberlangsungan dan

kelestarian program P2KP di Desa Ungaran. Keberlanjutan perguliran dana terhadap KSM juga akan menjamin pelaksanaan peran-peran BKM lainnya, seperti menyadarkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta dalam usaha BKM, rehabilitasi sarana dan prasarana dasar atau pengembangan usaha dan peran-peran lainnya.

Dilatar belakangi oleh pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul:

“Peran BKM Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan” (Studi Kasus Di Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dapat ditarik pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran BKM Al Amin dalam pelaksanaan P2KP di Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan peran anggota BKM Al Amin dalam pelaksanaan P2KP?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui informasi dan data yang sejelas-jelasnya mengenai peran BKM dalam pelaksanaan P2KP

2. Untuk mempelajari faktor-faktor yang mendukung peran BKM dalam pelaksanaan P2KP.

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pemahaman teoritis dan konseptual tentang pengembangan konsep *Community Development* (CD), yang lebih spesifik lagi pada aplikasi strategi *Locality Development* (LD).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi proses belajar yang diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengalaman serta pengetahuan penulis terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu metode dalam pekerjaan sosial.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan pihak terkait yang terlibat dalam P2KP, khususnya BKM Al Amin dalam menanggulangi kemiskinan.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam kerangka teori penulis akan mengungkapkan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, peran, program, proyek, P2KP, dan BKM.

1. **Kemiskinan**

Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah yang laten dan kompleks karena potensi-potensi yang ada (lingkungan fisik, alam, sistem sosial dan kebudayaan)

tidak atau belum dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif-alternatif baru atau tidak dapat memberikan nafkah yang cukup memadai bagi warganya (Suparlan, 1995:xvii).

Menurut Bradley R. Schiller yang dikutip oleh Ala (1981:4):

“Kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas”.

Menurut Salim, (1980:24) mengungkapkan kemiskinan sebagai berikut:

“Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya jumlah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan bila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.”

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.

Menurut Sayogyo yang dikutip oleh Mas'ood (2003:136):

“Kriteria untuk garis kemiskinan terletak pada jumlah pendapatan setara dengan beras. Dibedakan antara penduduk desa dengan kota. Untuk penduduk desa sebanyak 320 kg beras perkapita per tahun sedangkan penduduk kota sebanyak 480 kg beras perkapita per tahun”.

Dari definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang termasuk dalam golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan setara dengan 320 kg beras perkapita per tahun.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik garis batas kemiskinan ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

2.100 kalori per orang per hari plus beberapa kebutuhan non-makanan lain seperti

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan sumber daya alam. Kondisi tanah yang tandus, tidak adanya pengairan dan kelangkaan prasarana lain merupakan penyebab utama kemiskinan. kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan ekonomi sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (Mas'ood, 2003:138).

Kartasmita (1996:240-241) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab berikut:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari memanfaatkan peluang.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja dan kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat

terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Keempat penyebab yang diuraikan tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah, sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

Imbalan yang rendah juga menghambat pengembangan kegiatan sosial-ekonomi, serta membatasi peran serta penduduk miskin dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan didalam proses pembangunan, yang menikmati hasil pembangunan haruslah yang dapat menghasilkan sesuatu. Maka kunci pemecahan kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

2. Peran

Berkenaan dengan sangat pentingnya kedudukan BKM sebagai motor penggerak dan pengelola P2KP, maka keberhasilan BKM akan sangat dipengaruhi oleh peran yang dijalankan oleh anggota-anggotanya

Menurut Soebandiroso dalam Aswin (1998:28) peran adalah :

“Tingkah laku yang diharapkan diperbuat seseorang sesuai dengan statusnya yang tergantung pada kedudukan yang dimilikinya. Peran lebih banyak berhubungan dengan fungsi, penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat, yang merupakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya”

Menurut Wirutomo dalam Aswin (1998:28) mendefinisikan peran sebagai:

“Seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati tempat tertentu. Harapan tersebut merupakan imbangan dari norma yang ada dalam masyarakat.”

Peran berarti kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Setiap individu mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari kedudukan yang diperolehnya dalam masyarakat. Apabila individu tersebut telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka ia telah melaksanakan peran sesuai dengan yang diharapkan.

Besar kecilnya peran yang dijalankan oleh masing-masing anggota BKM dalam upaya menanggulangi kemiskinan, khususnya untuk meningkatkan pendapatan anggota-anggota KSM melalui P2KP dipengaruhi oleh beberapa faktor. Young Husband dalam Marbun (1986:14) menjelaskan bahwa peran yang dijalankan seseorang individu dipengaruhi oleh:

- a. *Culture role* : Peran yang ditentukan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat. Seseorang yang melaksanakan perannya harus sesuai dan menyesuaikan diri terhadap nilai budaya masyarakat.
- b. *Individual role* : Peran yang ditentukan oleh ciri-ciri atau karakteristik kepribadian seseorang, diantaranya usia, jenis kelamin, status di masyarakat, tingkat pendidikan, mata pencaharian, pendapatan.
- c. *Professional role* : Peran yang ditentukan oleh nilai-nilai profesi dimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai professional dimana ia bekerja.
- d. *Expectation role* : Peran yang ditentukan atas kemauan individu, kelompok, dan masyarakat dimasa mendatang.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku

yang diharapkan, dikehendaki seseorang yang merupakan hak dan kewajibannya sesuai

Menurut Marion J. Levy dalam Soekanto (1990:272) dari berbagai peran yang dimiliki individu dalam masyarakat, maka sangat penting untuk memperhatikan persoalan sebagai berikut:

- a. Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peran seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu dilatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena itu mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu besar dari pada kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan diri untuk membahas dan menganalisis faktor-faktor yang termasuk kedalam *individual role* dan *professional role* yaitu tingkat pendidikan, status sosial, tingkat ekonomi, jabatan anggota BKM, serta ada-tidaknya insentif dalam mendukung peran yang dijalankan anggota BKM Al Amin pada pelaksanaan P2KP.

3. Program

Menurut Marbun (1996:530)

“Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan; tertib acara”.

Sedangkan menurut Smith dalam Supratman (2006:32) mendefinisikan suatu program sebagai:

“A set of planned activities directed toward bringing about specified changes in an identified and identifiable audience”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa program adalah satu set aktivitas yang direncanakan yang mengarah kepada penyempurnaan perubahan yang ditetapkan di dalam suatu hal yang bisa diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat.

Berkaitan dengan peran BKM, maka program dalam hal ini berfungsi sebagai *monitoring* dan *evaluation* terhadap kegiatan KSM-KSM.

Dari sebuah program tentunya akan memunculkan sebuah proyek. Karena proyek merupakan bagian dari sebuah program. Untuk memudahkan penelitian maka proyek dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Sutrisno P.H (1985):

“Proyek adalah setiap usaha yang direncanakan sebelumnya yang memerlukan sejumlah pembiayaan serta penggunaan masukan lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam waktu tertentu pula”.

Sedangkan Soeharto (1999:4) mendefinisikan:

“Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasaran yang telah digariskan dengan jelas”.

Dengan demikian proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas yang memerlukan sejumlah pembiayaan serta penggunaan

masuk lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasaran yang telah digariskan dengan jelas.

4. P2KP

Dengan dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan baik itu kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan dengan dilandasi kesadaran perlunya upaya koreksi terhadap program-program pembangunan sebelumnya serta adanya harapan bahwa di masa depan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, maka pada tahun 1999 pemerintah memperkenalkan dan meluncurkan program P2KP. Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan institusi lokal (BKM dan KSM) sebagai landasan dan syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas berkenaan dengan hakekat P2KP maka penulis dapat menarik suatu definisi mengenai P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) sebagai:

“Suatu program pembangunan dalam upaya menaggulangi kemiskinan yang berlangsung berkelanjutan dalam jangka waktu terbatas melalui strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan penguatan institusi lokal.”

5. BKM

BKM adalah kependekan dari Badan Keswadayaan Masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata badan diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan keswadayaan berasal dari kata dasar

swadaya artinya kekuatan sendiri, dan masyarakat diartikan sebagai pergaulan hidup manusia (sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan atuaran tertentu), (W.J.S Poerwadarminta, 1989).

Dalam Buku Pedoman Umum P2KP (1999:36), BKM diartikan sebagai kelembagaan yang dirancang untuk membangun kemali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Di samping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama. Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian BKM yaitu lembaga masyarakat ditingkat desa yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat, terutama persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan menggulirkan dana dari P2KP kepada kelompok swadaya masyarakat.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk memudahkan pembahasan, maka dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
2. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan diperbuat seseorang yang merupakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan...

3. Program adalah satu set aktivitas yang direncanakan yang mengarah kepada penyempurnaan perubahan yang ditetapkan di dalam suatu hal yang bisa diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat.
4. Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas yang memerlukan sejumlah pembiayaan untuk melaksanakan tugas dan sasaran yang telah digariskan secara jelas.
5. P2KP adalah suatu program pembangunan dalam upaya menaggulangi kemiskinan yang berlangsung berkelanjutan dalam jangka waktu terbatas melalui strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan penguatan institusi lokal.
6. BKM adalah lembaga masyarakat di tingkat desa yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat, terutama persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan secara berkelanjutan dan berperan menggulirkan dana dari P2KP kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan pembahasan, maka dikemukakan variabel-variabel penelitian

2. Faktor-faktor yang mendukung peran BKM

- a. Tingkat Pendidikan dalam keterlibatan penyeleksian KSM, Rapat Sidang Prioritas dan penetapan kegiatan KSM, pemantauan dan pengawasan kegiatan KSM
- b. Status Sosial dalam keterlibatan penyeleksian KSM, Rapat Sidang Prioritas dan penetapan kegiatan KSM, pemantauan dan pengawasan kegiatan KSM
- c. Tingkat ekonomi dalam keterlibatan penyeleksian KSM, Rapat Sidang Prioritas dan penetapan kegiatan KSM, pemantauan dan pengawasan kegiatan KSM
- d. Jabatan dalam organisasi KSM dalam keterlibatan penyeleksian KSM, Rapat Sidang Prioritas dan penetapan kegiatan KSM, pemantauan dan pengawasan kegiatan KSM
- e. Faktor insentif dalam keterlibatan penyeleksian KSM, Rapat Sidang Prioritas dan penetapan kegiatan KSM, pemantauan dan pengawasan kegiatan KSM

G. METODE PENELITIAN

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun, 1988:4).
- b. Teknik dalam penelitian menggunakan survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi dan politik dari suatu kelompok atau daerah (Nasir, 1999:65)

1. Populasi dan Sampling

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling sensus yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam Supratman (2006:24) dimana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua anggota BKM yang berjumlah 17 orang.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun, 1989:192).
- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, transkrip dan sebagainya (Arikunto, 1992:200).
- c. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin (Singarimbun 1988:175).
- d. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1980:136).

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik kombinasi kuantitatif dan kualitatif; penganalisaan secara kuantitatif yaitu dengan mencari dan menghitung jumlah atau prosentase dari setiap variabel yang dicari. Sedangkan analisis data kualitatif adalah dengan cara menjelaskan dalam bentuk kata-

kata atau kalimat yang terstruktur logis yang dipish-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1993:209). Alat ukur yang digunakan adalah keterlibatan anggota BKM Al Amin pada kegiatan-kegiatan perguliran dana (terlibat; kadang-kadang; tidak pernah atau sering) yaitu pada keseluruhan pelaksanaan P2KP.

H. ALASAN PEMILIHAN LOKASI

1. Di Desa Ungaran masih banyak penduduk dalam kategori miskin.
2. BKM di daerah tersebut dapat menjalankan P2KP dengan baik.
3. Warga Desa Ungaran merupakan warga yang paling kritis dibandingkan dengan warga desa lain di Kecamatan Kutowinangun (penuturan Bapak Camat Kutowinangun dalam wawancara setelah diadakannya P2KP di Desa Ungaran).